# DAMPAK DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUMIAJI (Studi Di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Administrasi Publik ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh

TEKI KAROBA

NIM: 2016210169

KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG

2020

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana dampak dana desa

dalam pemberdayaan masyarakat, (2) untuk mengetahui bagaimana dampak dana

desa dalam pemberdayaan masyarakat, dengan penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi

teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian

model dampak dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa

dilihat dari pendekatan partisipasi masyarakat terlihat aktif musyawarah desa. Dan

pendekatan kesejahteraan masyarakat juga di pemerintah desa melalui dana desa

membuka lapangan pekerjaan seperti memberikan permodalan usaha kecil dan

menengah UKM dan koperasi desa melalui BUMDES, dan pendekatan

pembangunan dimana pembangunan secara fisik yaitu pembangunan irigasi bahu

jalan. Dan efektif apabila semua pihak di desa turut andil dalam memajukan desa

untuk kepentingan bersama.

Faktor yang mendukung sudah terlaksananya, dalam hal keterlibatan

kesadaran masyarakat menciptakan inovasi-inovasi baru seperti plengsengan,

drainase, paving trotoar. Sehingga dana desa bisa meningkatkan untuk

pemberdayaan masyarakat. Dan faktor yang menghambat dalam hal manusianya

pendidikan SDMnya menjadi menghambatnya akhirnya lebih banyak ke fisik.

**Kata kunci:** dampak dana desa dalam pemberdayaan masyarakat

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar belakang

Di era saat pemerintah Indonesia berupaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan nasional agar pembangunan daerah dapat berkembang pembangunan desa yang sinkron. Tetapi pada saat implementasi pembangunan nasional masin mengalami kendala pokok pembangunan, yakni mengalami masalah ketidaksesuaian pembangunan desa dan daerah maupun pusat.

Masalah ketimpangan dalam pembangunan mengalami banyaknya indikator yang mempengaruhi, sehingga memiliki dampak yang tinggi pada kemiskinan pada di Indonesia. Karena itu kemiskinan merupakan masalah sangat besar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Kemiskinan bukanlah hal yang baru, namun kemiskinan itu telah dirasakan oleh nenek moyang kita turung temurung yang dihadapi saat ini.

Pembangunan desa memiliki pengaruh yang penting maupun strategi dalam percepatan pembangunan daerah dan nasional, karena didalamnya terdapat pemerataan terhadap pembangunan hasil sehingga memiliki dampak langsung terhadap kepentingan bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yakni meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam pembangunan desa, pemerintah memiliki kedudukan sebagai besar dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga memiliki kewenangan subsistem mengurus dan mengatur untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan tugas dan kewenangan itu kewajiban desa dengan melaksanakan tugas pemerintah untuk pembangunan yang membutuhkan sumber pendapatan desa. Wahjudin Sumpeno (2011:3).

Diantara menyebabkan masyarakat desa adalah sumber pendapatan yakni: (1) desa mempunyai anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes yang sangat kecil dan sumber pendapat itu tergantung pada bantuan yang sangat kecil juga. (2) kesejahteraan masyarakat yang sangat rendah sehingga susah bagi desa mendapatkan pendapatan asli daerah yang tinggi. (3) berapa masalah yang diikuti yang rendah nya dan operasional desa dalam mengimplementasikan pelayanan

publik. (4) banyaknya kegiatan atau program pembangunan masuk ke desa akan tetapi yang mengelola hanya dinas terkait.

Menangani kendala tersebut, pemerintah memberikan support keuangan kepala kepala desa salah satunya yakni berasal dari desa itu sendiri dalam perimbangan karena pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang minim 15% digunakan untuk desa yang disebut (ADD). Dengan adanya pemberiannya ADD sesungguhnya disebut sebagai bantuan stimulan atau dana pendorong yang pembiayaan kegiatan atau mendukung program desa yang didukung oleh masyarakat. Adanya gotong royong masyarakat dengan implementasi kegiatan program desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Otonomi asli desa mempunyai makna kewenangan bagi pemerintah desa dalam mengurus kepentingan masyarakatnya yang didasari pada asal usul dan nilai-nilai adat desa yang setempat namun harus melaksanakan dengan perspektif. Dalam menjalankan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun pembangunan maka membutuhkan sumber pendapatan desa. Haw. Widjaja (2014: 6)

Peraturan pemerintah republik indonesia No. 60 Th 2014 tentang dana desa yang bersumbernya dari pendapatan belanja negara. Pasal 21 Ayat (3) dengan rincian pembangunan desa adalah 30% dalam penduduk desa, 20% untuk wilayah desa dan untuk 50% angka kemiskinan desa.

Bantuan dari dana desa yakni diwujudkan dengan kebutuhan masyarakat dalam hal menyelenggarakan otonomi dapat bertumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhannya desa itu sendirinya karena berdasarkannya nilai-nilai beraneka ragam, berpartisipasi masyarakat, demokrasi, karena memberdayakan masyarakat. Sehingga mempunyai hak desa untuk mendapatkan hasil pajak daerah atau kabupaten kota.

Peraturan pemerintah daerah dan desa pembangunan tertinggal dan transmigrasi No.22 Th. 2015 perubahannya peraturan pemerintah No.60 Th.2014 tentang bersumber dana desa dari APBN. Perlu mendapatkan prioritas utama pembangunan daerah yang tertinggal

### 1. Pembangunan Desa

Adanya dana desa yang digunakan untuk membangun sektor ditujukan desa untuk membangun kesejahteraan, meningkatkan kualitas SDM sehingga prioritas pengguna Desa yang ditujukan dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan desa.

### **2.** Dalam memberdayakan masyarakat

Dengan adanya kegiatan program pemberdayaan desa sehingga untuk meningkatkan kapabilitas, kapasitas dalam upaya potensi sumber daya manusia dapat hidup mandiri.

Meningkatnya biaya dana desa yang begitu disalurkan kepada desa dengan nilai cukup besar, maka pemerintah kabupaten malang perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengalokasian, pengelola dan penggunaan dana desa. Pada berikutnya juga perlu dikaji dan dipahami sangat mendalam di kabupaten malang.

Akhirnya peneliti mempunyai alasan untuk memilih meneliti dana desa di desa Bumiaji di bandingkannya dengan program yang lainnya di selenggarakan oleh pemerintah Bumiaji, peneliti tertarik karena program dana desa mempunyai implikasi yang sangat besar dan signifikan dalam pembangunan desa Bumiaji. Kendali suatu visi dalam program yang sepenuhnya dikelola oleh swadaya yakni kepala desa dan masyarakat setempat, oleh sebab itu peneliti memilih tugas akhir yang berjudul "dampak dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Bumiaji"

#### 1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana dampak dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Bumiaji?
- 2. Apa faktor pendukung dan penghambat dampak dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Bumiaji?

### 1.3 Tujuan penelitian

- 1. Untuk mengetahui dampak dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Bumiaji.
- 2. Untuk mengetahui faktor pendukung penghambat dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Bumiaji.

## 1.4 Manfaat penelitian

Adapun penelitian ini sebagai berikut:

- Berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan bahan untuk sarana baik berupa data dan informasi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini berharap mampu memperkaya ilmu dan memperdalam kajian mengenai Dampak dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bumiaji.
- 2. Berharap sebagai bahan pembanding bagi saran dan mengatasi kendala dan permasalahan dampak pemberdayaan masyarakat mengimplementasikan program serta tugas pokok, fungsi dan tata kerja di waktu waktu yang akan datang dampak dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Bumiaji.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anwas, M Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Erwin. 2019. *Panduan Pengunaan Dan Pengeloaan Dana Desa*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Maleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdukarya Mardikanto, Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung Alfabeta.
- Mahi, Trigunarso. 2017. *Perencanaan pembangunan daerah*. Depok: PT charisma putra utama
- Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga
- Pronoto Dkk. 2011. Revitalisasi Administrasi Pembangunan Berbasis Jati Diri Krakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alfabea
- Sumpeno. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Read Indonesia
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitaif. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah muncul Antitesisnya*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman. 2014: 23. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Jogja: Pustaka pelajar.
- Widjaja, 2014. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh: PT raja grafindo persada Jakarta

#### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Keuangan Desa

- Peraturan menteri Keuangan RI No. 49/PMK/07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Jurnal Administrasi Publik Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Jap), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212 | 1203
- Hulu, Y. Harahap, R.H. & Nasutian, M.A. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 146-154.
- Soleman Renda Bili, Dekki Umamur Ra'is *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*Issn. 2442-6962 Vol. 6, No. 3 (2017)